

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 173-01-18-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **21:40** WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh:

Partai Nanggroe Aceh untuk Provinsi Aceh

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 membe kepada Muslim A Gani, S.H, dkk	rı kuasa
Selanjutnya disebut sebagai Pem	ohon;
Terhadap	
Komisi Pemilihan Umum	
Selanjutnya disebut sebagai Termo	ohon;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **04:37 WIB**.

Plt. Panitera Muhidin





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran: e-AP3 Nomor 173-01-18-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Partai Nanggroe Aceh Kuasa Hukum : Muslim A Gani, S.H, dkk

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun

2024

Pengajuan Permohonan : 23 Maret 2024 pukul 21:40 WIB

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	
4	Surat Persetujuan Partai Politik		file yang dilampirkan bukan merupakan surat persetujuan partai politik

Jakarta, 25 Maret 2024 Plt. Panitera, Muhidin

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
- Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau d situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id